



**KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

NOMOR : 900/3/2024

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bae Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 7. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 8. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:
1. menyusun RAK Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
2. Inspektur Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Bae;
5. Ketua BPD Desa Bae.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 900/3/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	AGUNG BUDIYANTO, SE	Kepala Desa	PKPKD	Sesuai Tupoksi
2.	SITI RUFAIDAH SULISTIANA	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Sesuai Tupoksi
3.	SURAJI	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
4.	AKHMAD FALIKH	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
5.	ACHMAD ZAMRONI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
6.	MUHAMMAD ABDUL AZIZ, S.Pd.I	Plt Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
7.	RIDLWAN, S.Pd.I	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Sesuai bidang tugasnya

